

#10

Tanah Bertuah Negeri Beradat: Kabupaten Serdang Bedagai

Ririn Purba & Fedrickson Haradongan

A. Menyatu dalam Data: Sebuah Pengantar

Serdang Bedagai, sebuah wilayah kabupaten yang diambil dari dua wilayah kesultanan yang pernah berkuasa di daerah ini, yakni Kesultanan Serdang dan Padang Bedagai. Kabupaten Serdang Bedagai memiliki luas wilayah 1.900,22 kilometer persegi, terbagi dalam 17 kecamatan, 237 desa, dan 6 kelurahan (Gambar 10.1). Kabupaten Serdang Bedagai banyak didiami oleh penduduk dari beragam etnis/suku bangsa, agama, dan budaya. Jumlah penduduk Kabupaten Serdang Bedagai berjumlah 657.490 jiwa (150.281 keluarga) dengan kepadatan penduduk rata-rata 346 jiwa per kilometer persegi. Keragaman budaya di wilayah ini terlihat dari keberadaan berbagai suku, antara lain Melayu, Batak Toba, Batak Simalungun, Jawa, Karo, Batak Angkola, Batak Mandailing, Minangkabau, Banjar, Aceh, Nias, dan Tionghoa-Indonesia.

R. Purba,* & F. Haradongan

*Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, e-mail: riri006@brin.go.id

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional

Purba, R., & Haradongan, F. (2023). Tanah bertuah negeri beradat: kabupaten serdang bedagai. Dalam Humaedi, M. A., Imron, D. K. & Pramono, A. (Ed.), *Mencatat untuk Membangun Negeri Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Seri 2: Indonesia Tengah-Barat* (347–386). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.777.c712 ISBN: 978-623-8052-95-0 E-ISBN: 978-623-8052-99-8



Sumber: Google Maps

Gambar 10.1 Kabupaten Serdang Bedagai

Kegiatan perdana Regsosek tahun 2022 adalah langkah inisiasi dari pemerintah untuk melihat fluktuasi perubahan tingkat kesejahteraan di masyarakat yang dijabarkan ke dalam satu data riil tentang struktur masyarakat secara nasional. Data riil ini akan dijadikan sebagai data kunci untuk mengintegrasikan seluruh program pemerintah yang bertemakan perlindungan sosial, kesejahteraan, dan pemberdayaan (ekonomi) masyarakat. Metodenya hampir serupa dengan sensus penduduk, hanya subjek pendataan meliputi seluruh kepala keluarga di daerah kabupaten/kota.

Persiapan BPS Kabupaten Serdang Bedagai dalam menyambut penugasan kegiatan Regsosek 2022 boleh dikatakan cukup solid. Dengan waktu persiapan yang singkat, rangkaian pendataan keluarga per keluarga pada wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dapat berjalan optimal walaupun terdapat beberapa hambatan karena pengaruh kondisi alam. Strategi awal yang diupayakan oleh Bapak Herman, S.E., M.Si., selaku Kepala BPS Kabupaten Serdang Bedagai adalah mengoptimalkan koordinasi dan sosialisasi ke sejumlah instansi pemerintah daerah di Kabupaten Deli Serdang, mulai dari Bapak Bupati Deli Serdang yang menyambut baik kegiatan Regsosek ini dengan menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk turut berpartisipasi menyukseskan kegiatan ini di masyarakat, satuan

pengamanan daerah (Kodam/Kodim dan Polres setempat), organisasi suku dan budaya, dan seluruh satuan perangkat kecamatan/kelurahan/desa.

Langkah selanjutnya, menyiapkan kekuatan personil petugas lapangan. Basis petugas lapangan adalah Mitra BPS aktif, yaitu satuan personil yang sudah direkrut BPS untuk menunjang setiap kegiatan BPS di suatu wilayah. Pada kegiatan besar tertentu (seperti pendataan Regsosek) biasanya jumlah petugas lapangan yang diperlukan sangat banyak sehingga dilakukan proses rekrutmen untuk menjadi mitra baru untuk petugas lapangan. Rekrutmen petugas lapangan dimulai dari tingkat Petugas Pendataan Lapangan (PPL), Petugas Pemeriksa Lapangan (PML), hingga Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka). Proses rekrutmen petugas lapangan dilakukan oleh BPS Kabupaten Serdang Bedagai secara selektif dan sistematis melalui seleksi khusus. Setelah terseleksi, mitra baru tersebut akan dikontrak dan dibina dari BPS Pusat. Khusus petugas lapangan pada jenjang tingkat Koseka, rekrutmen diprioritaskan bagi internal pegawai BPS, yang disebut dengan istilah Koseka organik.

Pelaksanaan pendataan Regsosek tahun 2022 di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai ditargetkan rampung dalam kurun waktu 1 bulan (15 Oktober s.d 14 November). Target pendataan pada wilayah ini adalah 17 kecamatan dengan jumlah keluarga (status kawin) sekitar 150.281. Untuk menuntaskan misi ini, tak kurang dari 31 Koseka (25 organik, 6 non organik), 217 PML dan 868 PPL disiapkan oleh BPS Kabupaten Serdang Bedagai. Jumlah dan komposisi tersebut menandakan terdapat lebih dari 1.000 petugas lapangan menyebar dari pusat wilayah hingga pelosok Serdang Bedagai untuk mendata setiap keluarga dengan berbagai status. Dalam lorong kecil, observasi kami bersama petugas lapangan, terdapat kisah kehidupan yang memiliki makna khusus baik cerita mendalam dari responden keluarga saat wawancara ataupun kisah hidup beberapa teman petugas lapangan (PPL dan PML). Di lapangan, peran PPL sangat vital bak jangkar kapal yang turun ke dasar laut saat berlabuh, mereka adalah petugas lapangan yang turun hingga ke lokasi sempit dan terpencil.

Saat kami berkeliling bersama di lapangan, sering kali bertemu dengan kondisi cuaca yang kurang mendukung (saat kegiatan berlangsung bertepatan dengan musim hujan) yang bisa membuat genangan air di sekitar wilayah pendataan. Dengan kondisi ini, menjadi kendala karena *delay* pendataan keluarga akan semakin meningkat. Selain karena terjadi tundaan pendataan wawancara keluarga, cuaca hujan juga dapat memengaruhi kinerja petugas PPL dan PML karena kestabilan jaringan internet untuk proses input/unggah datanya ke *server* pusat. Kendala lainnya adalah hasil pendataan yang berbeda pada tingkat desa/kecamatan terkait pendataan warga miskin. Perbedaan data kemungkinan terjadi karena beberapa hal, seperti belum adanya proses *updating* data secara berkala pada tingkat desa/kecamatan terkait keluarga miskin dan belum dilakukan integrasi/penyesuaian data sosial ekonomi antarunit/instansi dari tingkat daerah sampai tingkat pusat. Melalui kegiatan pendataan awal Regsosek ini diharapkan adanya suatu *record* data yang memuat kondisi sosial dan ekonomi warga pada suatu wilayah yang dapat dijadikan data acuan bagi para instansi/*stakeholder* terkait. Pada isu tertentu, misalnya kemiskinan ekstrem, pendataan Regsosek ini dapat dijadikan rujukan basis data keluarga miskin yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan masyarakat.

B. Bentang Alam Tersulit

Tepat pukul 08.00 pagi, dari kota Medan kami melakukan perjalanan menuju wilayah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Perjalanan darat Medan—Sergai dapat ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam lewat jalan tol. Sepanjang tol perjalanan menuju Sergai, pemandangan dominan yang dijumpai adalah lahan perkebunan kelapa sawit di sisi kiri dan kanan jalan tol. Sekitar 1 jam berlalu, kami tiba di Sergai dan bertemu dengan Pak Iwan beserta Pak Majid selaku Koseka organik pada kegiatan Regsosek ini. Dalam pertemuan ini, kami berkoordinasi sekaligus berdiskusi panjang lebar tentang inti kehadiran yang bermaksud untuk melihat dan menyelami kegiatan pendataan di lapangan. Hasil diskusi mengantarkan kami bertemu kepada beberapa

petugas PML dan PPL di lapangan, lokasi sekitar wilayah Kecamatan Sei Rampah.

Dengan bekal penjelasan dan arahan dari Koseka, petugas PML dan PPL secara kooperatif memberikan informasi keluarga yang akan mereka wawancara pada hari itu. Maka, bergeraklah kami semua bersama-sama untuk menuju rumah keluarga yang akan diwawancarai. Sebelum menuju lokasi keluarga, Pak Iwan dan rombongannya mengajak kami untuk santap siang sejenak di warung makan khas daerah Sergai. Kondisi hari saat itu agak mendung (beruntung belum hujan), dalam perjalanan kami menuju lokasi keluarga menjadi terhambat karena genangan air (banjir) sekitar 30—40 cm sedang melanda lokasi tersebut (Gambar 10.2). Walaupun banjir ini tidak sampai menyebabkan putusnya konektivitas antar desa, tetapi akses ke lokasi keluarga cukup menyulitkan kami dan para petugas lapangan. Kami bersama petugas lapangan tidak menyerah dan yakin di mana ada kesulitan pasti ada jalan.

Setelah berjalan kaki melewati banjir (sekitar 15 menit), kami tiba di lokasi keluarga yang akan diwawancarai dengan petugas PPL. Kami bertemu dengan kakek tua sebagai perwakilan keluarga. Usia



Sumber: Ririn (2022)

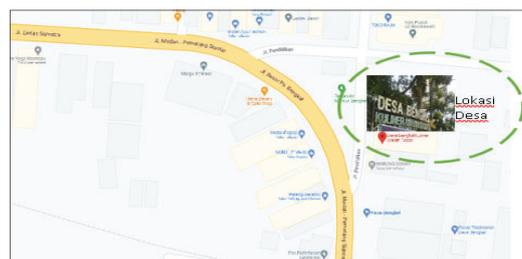
Gambar 10.2 Koseka BPS Serdang Bedagai, BRIN, PPL, BPS Pusat, BRIN, Kepala TU Serdang Bedagai, dan PML (Kiri ke Kanan)

kakek ini adalah 70 tahun dan masih bekerja sebagai juru parkir di pasar. Kakek tua yang didata ini banyak berkeluh kesah dan berbagi harapan ke petugas lapangan seputar masalah bantuan sosial saat diwawancarai. Selesai wawancara, kami akhiri dengan ucapan terima kasih kepada kakek tua, sembari menguatkan harapan kakek tua akan adanya program bantuan sosial yang lebih baik.

1. Desa Bengkel: Pusat UMKM Serdang Bedagai

Hari berikutnya, kami pergi mengunjungi lokasi lainnya, yaitu Desa Bengkel. Lokasi desa ini berada di jalan nasional lintas Sumatra, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatra Utara. Posisi desa yang berada di jalan lintas menjadikan desa ini tempat persinggahan (*rest area*) para pengendara dan penumpang kendaraan kala itu (Gambar 10.3).

Dahulu, sebelum tahun 2017, sepanjang jalan nasional desa ini ramai dengan kios oleh-oleh jajanan khas masyarakat desa. Jajanan khas yang dijual merupakan produk unggulan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) milik masyarakat desa setempat. Produk unggulan yang paling khas dan melimpah dari desa ini adalah dodol. Oleh-oleh dodol dari desa ini sudah cukup populer di kalangan pengendara dan penumpang kendaraan yang melintas karena kualitas dan rasanya yang unik (Gambar 10.4). Selain dodol, jajanan favorit khas lainnya yang sering dijadikan buah tangan adalah aneka keripik



Sumber: Google Maps (2022)

Gambar 10.3 Peta Lokasi Desa Bengkel



Foto: Ririn (2022)

Gambar 10.4 Salah Satu UMKM yang Masih Bertahan

(keripik pisang, keripik ubi, keripik sukun, dll.), aneka buah olahan, dan kerupuk.

Namun, kondisi saat ini sudah berbeda jauh. Kios-kios jajanan khas sepanjang jalan nasional di desa bengkel nampak sepi dan lengang sejak beroperasinya jalan tol Medan—Tebing Tinggi (Gambar 10.5). Sebagian besar pengendara mobil dan penumpangnya tidak lagi melewati ruas jalan nasional Desa Bengkel karena lebih memilih rute pada ruas jalan tol yang dapat menghemat waktu perjalanan. Situasi ini mengakibatkan penurunan aktivitas penjualan oleh-oleh yang terjadi pada sebagian warga desa bengkel yang berprofesi sebagai pedagang usaha (UMKM). Oleh-oleh jajanan khas desa ini akhirnya sepi pembeli. Hal tersebut juga berdampak pada perekonomian sebagian warga desa dan ada peningkatan angka pengangguran karena banyak kios oleh-oleh yang tutup.

Hasil wawancara kami kepada salah satu pemilik kios (Bu Halimah), mengatakan kalau dulu (sebelum adanya tol Medan-Tebing Tinggi) omzet penjualan dodol bisa mencapai 5 juta rupiah per hari, tapi sekarang ini jauh dari itu, paling maksimal hanya 500 ribu rupiah per hari. Ibu dari lima anak ini mengatakan kondisi usahanya cukup berat, selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti biaya



Foto: Ririn (2022)

Gambar 10.5 Beberapa UMKM di Rruas Jalan Desa Bengkel yang Gulung Tikar

sekolah dan kebutuhan sehari-hari, dia juga harus menggaji dua orang karyawan yang bekerja di kiosnya. Kini, harapan Bu Halimah dan warga desa yang berprofesi sebagai pedagang UMKM adalah bagaimana solusi menghidupkan kembali penjualan produk unggulan dodol desa bengkel agar kembali menjadi oleh-oleh favorit yang diingat kembali dapat diperoleh dari desa ini.

C. Menelisik Awal Kesemestaan Data di Negeri Beradat

Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) adalah pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan. Data Regsosek akan menjembatani koordinasi dan berbagi pakai data lintas lembaga dan lintas daerah untuk memastikan pemakaian data yang konsisten karena terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya hingga

tingkat desa/kelurahan. Kegiatan survei Regsosek akan menjangkau sejumlah informasi kondisi sosial ekonomi masyarakat, antara lain pekerjaan, kepemilikan aset (rumah dan kendaraan), kondisi informasi keluarga, dan informasi sosial ekonomi lainnya.

Hasil data Regsosek ini akan mengungkap data sosial ekonomi terbaru yang lebih perinci dan nyata karena pendataan yang dilakukan adalah secara menyeluruh (Sabang sampai Merauke) per kepala keluarga dalam kurun waktu satu bulan. Data makro Regsosek (yang disertai foto dan *tagging* lokasi) akan menjadi data acuan seluruh lembaga pemerintah dalam membuat sistem/program perlindungan sosial kepada masyarakat. Posisi program Regsosek saat ini akan memperkuat program-program perlindungan sosial lainnya yang sudah ada sehingga dimungkinkan terjadinya integrasi (penyatuan) menjadi data acuan untuk menghindari dualisme atau lebih versi data.

Program perlindungan sosial pada hakikatnya memiliki tujuan mulia untuk mengatasi kemiskinan dan celah (*gap*) sosial melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi dirinya dari bencana dan kehilangan pendapatan. Saat ini, meskipun memiliki banyak program perlindungan sosial, tetapi target dan segmentasinya kadang kala masih salah sasaran dan kurang tepat. Nah, untuk itu kehadiran program Regsosek kali ini akan menjadi data acuan yang akan diandalkan seluruh lembaga pemerintah dalam membuat semua jenis sistem/program perlindungan sosial kepada masyarakat.

Hasil data Regsosek akan memecahkan permasalahan bantuan sosial antara lain akurasi target yang masih sangat rendah, sasaran setiap program yang berbeda-beda, pemutakhiran data sektoral yang tidak terintegrasi, penyaluran yang lambat dan tidak tepat sasaran, masih adanya tumpang tindih target penerima, kelompok demografi lanjut usia dan difabel yang jarang mendapat perhatian, serta kurang optimalnya sosialisasi dan edukasi kepada calon penerima bantuan. Untuk itu dengan hadirnya program Regsosek, nantinya akan terjadi pembaharuan data acuan (yang valid dan terintegrasi) secara lengkap

dan berkala tentang keberadaan jumlah penduduk yang tingkat kesejahteraannya buruk.

D. Antara Nilai Positif dan Tantangan dalam Mendata

Ketika kami mendampingi petugas lapangan dalam mendata (wawancara) ke beberapa keluarga, disambut dengan bermacam pikiran/pandangan dari sejumlah tuan rumah. Terdapat dua jenis pikiran/dugaan dari kalangan keluarga. Bagi kalangan keluarga menengah ke bawah, arah pemikiran mereka menganggap bahwa proses pendataan kali ini akan menandakan adanya semacam bantuan sosial yang akan mereka terima. Sinyal akan pemikiran ini semakin menguat ketika kami dan petugas lapangan disambut dengan hangat dan terbuka dalam setiap wawancara pertanyaan. Agak berbeda dengan kalangan menengah ke atas, sorot wajah tuan rumah yang didatangi untuk pendataan, begitu datar dan terkesan ingin cepat berlalu. Artinya, dua perbedaan pikiran ini bisa mengindikasikan tingkat kepentingan dan harapan Regsosek di selang kelas masyarakat.

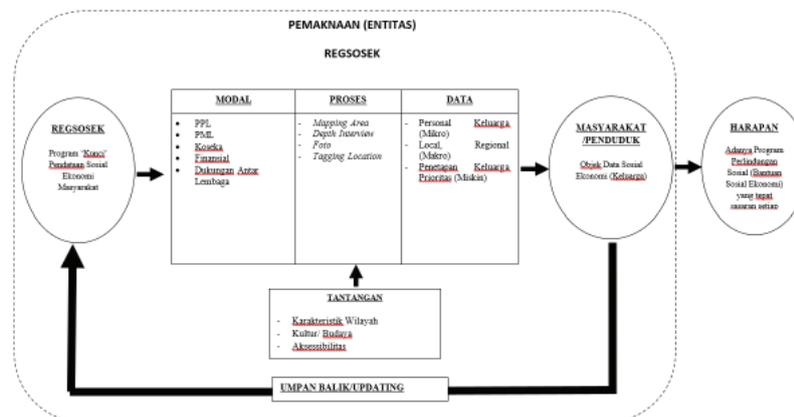
Sosialisasi pelaksanaan Regsosek di masyarakat sudah dilakukan optimal, baik melalui media massa, elektronik, pesan digital (WA, *text*, *e-mail*), dan papan pengumuman. Namun, tafsir masyarakat akan Regsosek kenyataannya masih berbeda. Kenyataan ini sebetulnya bukan menjadi masalah yang besar karena hal ini tergantung dari pengaruh kepentingan Regsosek terhadap harapan masyarakat dalam pendataan kali ini. Penekanan makna Regsosek dari sisi pemerintah sudah jelas, mendata semua keluarga nusantara yang berfokus pada kondisi sosial ekonomi. Sementara pada kalangan masyarakat, pendekatan pemaknaan Regsosek ini lebih ke arah dugaan pertanyaan apa kepentingannya untuk keluarga, adakah harapan/keuntungan bagi keluarganya. Dari dua dugaan pertanyaan tadi, maka akan terbentuk cara pandang masyarakat dalam memaknai Regsosek ini.

Makna lebih dalam dari sebuah program Regsosek adalah mengenai pertumbuhan dan perubahan sosial masyarakat. Pertumbuhan diartikan sebagai peningkatan kemampuan setiap

keluarga (masyarakat dibawah rata-rata) untuk berkembang minimal menjadi standar, tidak hanya sekedar mampu bertahan untuk memenuhi kebutuhan hidup (pokok) semata. Perubahan mengandung makna bahwa suatu keluarga harus bersikap adaptif dan antisipatif dalam menghadapi tuntutan kondisi dan situasi yang berbeda, dari satu jangka waktu ke jangka waktu yang lain, terlepas apakah situasi yang berbeda itu dapat diprediksi atau tidak. Artinya, pada kondisi darurat, suatu keluarga seyogianya memiliki kemampuan manajemen bertahan hidup yang layak.

Bagaimana makna Regsosek ini dapat bernilai dan menjadi perhatian (harapan) bagi setiap kalangan masyarakat (keluarga). Mengacu pada sistem pemerintahan (demokrasi) di negara ini, berarti mengizinkan warga negara ikut serta, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, program/pengembangan pembangunan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, adat dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Dengan kata lain, setiap perencanaan program pemerintah (termasuk Regsosek) dapat melibatkan partisipasi/keikutsertaan masyarakat. Ada tiga hal keuntungannya, yaitu 1) partisipasi masyarakat merupakan suatu alat untuk mendapatkan informasi tentang kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, 2) masyarakat akan lebih mudah memercayai kegiatan atau program pendataan jika mereka terlibat secara langsung, mulai dari proses persiapan dan perencanaan karena masyarakat akan lebih mengetahui mengapa didata sehingga akan lahir rasa memiliki terhadap program pendataan yang akan dilaksanakan, dan 3) masyarakat dapat aktif memantau dan saling berbagi informasi program pendataan dengan masyarakat lainnya di lingkungan setempat.

Perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam Regsosek tentu dibutuhkan dan betul sudah dilakukan. Bentuk implementasinya adalah adanya proses rekrutmen tenaga petugas lapangan (PPL, PML, dan Koseka). Namun, bagaimana (tanda) menilai komposisi keterlibatan unsur masyarakat dalam program



Gambar 10.6 Skema Pemaknaan (Entitas) Regsosek (2022)

Regsosek sudah optimal atau belum. Salah satu tandanya adalah melihat tingkat kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan program pendataan ini.

Pemaknaan (entitas) Regsosek (Gambar 10.6) sebaiknya memiliki konsep sistematis yang mudah dipahami oleh seluruh kalangan, mulai dari nama program, modal (sumber daya), proses (cara dan strategi), *goal* (data sosek keluarga), dan target program. Program pendataan Regsosek adalah langkah awal (kunci) untuk membangun dan mengintegrasikan seluruh program pemerintah yang bertemakan perlindungan sosial, kesejahteraan dan pemberdayaan (ekonomi) yang menargetkan masyarakat (penduduk) sebagai objek datanya. Dalam pelaksanaannya, komponen (modal) utama yang menjadi tombak program pendataan ini (selain anggaran) adalah petugas lapangan (PPL, PML, dan Koseka), yang mendapat dukungan penuh dari seluruh stakeholder/lembaga pemerintah terutama di daerah. Proses (strategi) pendataan oleh petugas lapangan dilakukan melalui beberapa rangkaian proses, yaitu pembagian peta wilayah kerja petugas lapangan, wawancara kondisi sosek keluarga, foto bangunan, dan *tagging* lokasi. Hasil pendataan yang lengkap, data

sosek per keluarga, naik dan disusun ke dalam skala tingkat wilayah dari desa/kecamatan, kota/kabupaten, dan provinsi. Selanjutnya, adalah penetapan keluarga prioritas (miskin) sesuai kriteria sosek untuk dijadikan sasaran (*demand*) program bantuan sosial.

Masyarakat memiliki pandangan yang beragam mengenai proses pendataan di keluarganya. Bagi sebagian masyarakat menengah ke atas beranggapan bahwa Regsosek merupakan proses pendataan yang sifatnya formalitas kegiatan yang tidak berpengaruh kepada mereka. Para PPL yang mewawancara terkadang disambut dengan acuh (sikap kurang senang) karena mungkin dianggap tidak ada kepentingannya dengan mereka. Berbeda dari kalangan masyarakat bawah, memaknai pendataan ini sebagai harapan untuk mendapatkan bantuan. Petugas lapangan yang akan mendata dan mewawancara mereka rata-rata berkomunikasi dengan hangat dan terbuka, bahkan dalam kondisi/keadaan yang serba terbatas. Informasi dari Kepala Dusun III Kecamatan Perbaungan, Bapak Martono, mengatakan bahwa pendataan warga miskin di dusunnya sudah dilakukan mandiri dan dilaporkan secara berkala ke tingkat kecamatan. Namun hasil aliran bantuan sosial masih diberikan kepada data keluarga yang sama yang kadang telah mengalami perubahan sosial ekonomi yang baik. Sistem umpan balik (*updating*) belum terintegrasi dengan baik melalui perubahan data warga miskin yang berkala dari tingkat dusun, desa, kecamatan, dinas hingga ke pusat. Mungkin sebagian kecil kalangan masyarakat yang menilai bahwa kegiatan semacam ini mampu membangun sosial ekonomi sesama masyarakat dan bermanfaat bagi sesama.

Karena keterbatasan waktu dan hal lainnya, tim peneliti memang belum mampu sepenuhnya menggambarkan dan menggali lebih dalam persepsi-persepsi masyarakat mengenai pendataan Regsosek kali ini. Namun, setidaknya kami telah berjuang dan mengoptimalkan hasil temuan kami di lapangan selama kurun waktu satu minggu. Kami berharap, temuan-temuan yang didapatkan dalam Regsosek ini dapat bernilai bagi para pembacanya dan memberikan nilai tambah/

masuk pada kegiatan Regsosek mendatang (sensus pendataan lainnya).

Ragam makna Regsosek yang tersirat. Meski terlalu singkat waktu kebersamaan, mungkin untuk saat ini, ungkapan itulah yang dapat kami sampaikan untuk pandangan awal di kegiatan perdana Regsosek tahun 2022 ini. Dengan persiapan singkat dan seketika, tentu menjadi misi dan tantangan yang berat bagi penyelenggara, khususnya petugas yang turun ke lapangan.

E. Negeri Beradat, Pendukung Utama Pendataan

Pendataan Regsosek yang sangat singkat yaitu hanya berkisar satu bulan saja tentu memerlukan kolaborasi dari berbagai elemen di dalamnya yang dapat mempermudah pendataan. Kabupaten Serdang Bedagai yang masyarakatnya sangat majemuk juga membuat para petugas lapangan harus melakukan berbagai pendekatan yang berbeda agar hasil pendataan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. BPS sebagai lembaga vertikal tentu juga harus menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah daerah setempat dan berbagai elemen masyarakat agar mudah diterima sebab BPS memiliki tanggung jawab pendataan baik itu sensus nasional dan survei.

Sebelum dimulainya pendataan Regsosek, Kepala BPS Kabupaten Serdang Bedagai juga melakukan pendekatan melalui siaran radio. Bapak Herman selaku pimpinan di BPS Kab. Serdang Bedagai bersama dengan Bapak Iwan selaku Pranata Komputer Madya di BPS Serdang Bedagai menciptakan sebuah *jingle* yang dinyanyikan bersama para pegawai di lingkungan BPS Serdang Bedagai (Sergai) lalu kemudian disebar melalui kanal youtube, instagram dan facebook unit kerja tersebut. *Jingle* tersebut juga diputar sebanyak lima kali setiap harinya di radio daerah setempat untuk mengingatkan warga masyarakat Sergai bahwa pentingnya pendataan Regsosek ini. Lantunan lagu dan musik ini menjadi tanda semangat dari para petugas dan pentingnya partisipasi dari masyarakat untuk mensukseskan Regsosek 2022. Berikut judul lagu dan lirik lagunya.

“Bersama Pasti Sukses”

Oleh: BPS Serdang Bedagai

Ayo sukseskan pendataan registrasi sosial ekonomi

Ayo sukseskan pendataan registrasi sosial ekonomi

Untuk menuntaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Yo ayo ayo yo ayo ayo yo ayo ayo yo ayo ayo

Rapatkan barisan dan derap langkah

Kobarkan semangat pengabdian

Demi masa depan bangsa negara dan data berkualitas untuk Indonesia maju

Bersama pasti sukses, bersama pasti sukses, bersama pasti sukses

Yo ayo ayo yo ayo ayo yo ayo ayo yo ayo ayo

Lirik lagu tersebut memiliki filosofi sebagai penyemangat para petugas di lapangan dan juga sebagai media sosialisasi kepada masyarakat bahwa Regsosek ini sangat berguna untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan demi masa depan negara yang lebih maju. Memutar lagu ini secara berkala tentu diharapkan dapat membuat masyarakat lebih peka tentang pentingnya data. Selain itu, dengan diputarnya *jingle* ini juga untuk mengingatkan masyarakat apakah rumahnya sudah didata oleh petugas atau belum.

Kemudian, jaringan yang telah dibangun oleh Bapak Herman dengan pemerintah daerah juga menjadi salah satu alasan dapat terlaksananya Regsosek di Kabupaten Serdang Bedagai dengan lancar. Sebelum Regsosek berjalan, Kepala BPS Sergai telah bersurat kepada Bupati Serdang Bedagai dan DPRD Serdang Bedagai agar dapat membantu dalam menyosialisasikan pentingnya kegiatan pendataan ini. Pada awal pendataan, Bupati Sergai mengunggah foto di akun Facebook pribadinya dan menuliskan penjelasan tentang pentingnya

kegiatan Regsosek ini. Selain itu, beliau juga mengajak masyarakat untuk percaya pada para petugas karena para petugas melakukan pendataan itu bukan semata-mata menjadi seonggok laporan tak berguna, tetapi akan dijadikan sebagai basis data agar Indonesia lebih maju. Maraknya penipuan dan pinjaman *online* memang membuat banyak masyarakat yang waspada dalam memberikan informasi terkait keluarganya dan hal inilah yang diantisipasi Bupati Serdang Bedagai. Dengan memberikan contoh bahwa mereka bersedia didata petugas Regsosek, diharapkan dapat menjadi contoh awal bagi masyarakat untuk dapat menerima petugas jika datang ke rumah masing-masing penduduk.

Selain mendekati para pemimpin lokal, pimpinan BPS Serdang Bedagai juga mendekati berbagai elemen di masyarakat, contohnya adalah perkumpulan Tionghoa, perkumpulan pengusaha, Gapensi, partai politik, dan lainnya. Pak Herman membangun relasi tersebut secara informal lebih dahulu, yaitu dengan mengikuti kegiatan pertemuan para anggota yang dilaksanakan secara rutin. Mendekati pimpinan-pimpinannya menurutnya akan mempermudah langkahnya agar diterima oleh para anggotanya. Bapak Herman memahami betapa pentingnya membangun jaringan dari berbagai elemen dan kalangan di masyarakat karena dukungan dari mereka juga sangat berguna dalam pelaksanaan pengumpulan data.

“Kalau kita sudah pegang kepalanya, nanti mudah itu dekat dengan anggotanya. Kita itu cari kepalanya dan pastikan dia nanti membawahi massa yang banyak pula. Kita mengundang pimpinannya sebagai pembicara, otomatis nanti para anggotanya akan mendengar, itu penting. Saya juga dekat itu dengan ketua perkumpulan Tionghoa supaya kita juga bisa diterima oleh masyarakat Tionghoanya.” (Wawancara dengan Pak Herman, 4 November 2022)

Pak Herman membangun modal sosial yang dapat memudahkan para petugas BPS agar dapat diterima oleh masyarakat. Beliau menyadari bahwa ia sebagai pimpinan juga memiliki tugas untuk

membuka akses agar para anggotanya mendapatkan kemudahan selama di lapangan. Modal sosial yang terdiri atas kepercayaan (*trust*), aturan (*norm*), dan jaringan (*network*) telah dibangun oleh pimpinan BPS Sergai jauh sebelum kegiatan terlaksana (Putnam, 1993). Memanfaatkan modal sosial ini juga nyatanya sangat berguna ketika petugas mengalami penolakan dari masyarakat. Salah satu contohnya adalah ketika petugas di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai yang mengalami penolakan dari masyarakat Tionghoa setempat. Masyarakat tidak mengizinkan rumahnya dan keluarganya didata oleh para petugas dengan alasan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah selama ini dan menganggap pendataan ini hanyalah omong kosong belaka.

Menindaklanjuti hal tersebut, para petugas melakukan antisipasi sesuai dengan SOP yang ada, tetapi pada akhirnya pimpinan BPS menggunakan modal sosial untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jaringan dan kepercayaan yang telah dibangun oleh pimpinan BPS dengan ketua perkumpulan Tionghoa akhirnya membuka jalan agar petugas dapat diterima oleh masyarakat. Pak Herman menghubungi langsung ketua perkumpulan Tionghoa agar dapat membantu melunakkan hati masyarakat terkait pendataan Regsosek di beberapa daerah di Kabupaten Serdang Bedagai yang mengalami penolakan dari etnis Tionghoa. Dalam waktu singkat, para petugas akhirnya dapat diterima oleh masyarakat untuk melakukan pendataan setelah dikoordinir oleh ketua perkumpulan masyarakat Tionghoa. Dukungan dari para ketua-ketua elemen di masyarakat menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kegiatan Regsosek di Serdang Bedagai.

Dukungan para pihak terlihat dari hadirnya BPS Serdang Bedagai, kelembagaan sosial, adat dan perwakilan tokoh masyarakat dalam merencanakan dan memantau pelaksanaan Regsosek (Gambar 10.7). Kemudian, perangkat desa yakni kepala desa, kepala dusun dan tokoh masyarakat juga tak kalah pentingnya dalam mensukseskan kegiatan Regsosek di Serdang Bedagai. Pak Indra Fajar selaku kepala desa di Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, juga turut aktif dalam menggerakkan masyarakatnya agar



Foto: Ririn (2022)

Gambar 10.7 Dokumentasi saat melakukan FGD bersama BPS Serdang Bedagai.

bersedia didata oleh para petugas Regsosek. Desa Bengkel yang masyarakatnya sangat majemuk yakni terdiri dari multi-etnis dan suku ini juga menjadi sebuah keunikan tersendiri. Selain itu, Desa Bengkel juga merupakan ikon Kabupaten Serdang Bedagai karena merupakan pusat UMKM oleh-oleh yang sempat tersohor sebelum terkena dampak pembangunan tol Medan—Tebing dan COVID-19.

Pendataan Regsosek ini menjadi hal yang diharapkan dapat memperbarui data-data masyarakat setempat sebab banyak masyarakat yang terdampak pembangunan tol dan juga COVID-19. Desa Bengkel yang dulunya selalu dilintasi oleh berbagai jenis kendaraan dan disinggahi untuk membeli oleh-oleh ini sejak 2019 mengalami penurunan omzet sebagai dampak tol Medan—Tebing. COVID-19 juga semakin meningkatkan pengaruh terhadap penurunan pendapatan masyarakat yang memiliki UMKM. Penurunan omzt yang sangat signifikan membuat banyak pengusaha yang akhirnya gulung tikar. Menurut Pak Indra, dalam pendataan Regsosek ini sudah diawali

dengan berbagai tahapan bersama dengan BPS Kabupaten Serdang Bedagai sebelum para enumerator mulai melakukan pendataan ke setiap rumah (Gambar 10.8). Kesadaran pentingnya data yang valid membuat pemerintah desa juga ikut terlibat di dalamnya. Kepala dusun juga akan terlibat mengarahkan para petugas terkait batas wilayah karena Desa Bengkel memang cukup unik karena desa ini berada di pinggir jalan dan sekitar jalan yang mana hanya berjarak sekitar 100 meter dari jalan lintas Sumatra. Artinya, jika sudah lebih dari 100 meter, maka bukan lagi bagian dari Desa Bengkel.

“Di desa kami ini ada tradisi yang dilakukan untuk memperkuat silaturahmi saat maulid Nabi yaitu Aru Banjar. Karena di desa ini banyak suku Banjar, kegiatan datang ke rumah penduduk dan makan-makan itu dilaksanakan setiap Sabtu-Minggu dan itu jadwalnya masih ada sampai Januari agar semua penduduk Banjar kebagian rumahnya dijadikan tempat pelaksanaan Aru Banjar.” (Wawancara dengan Pak Indra 2 November 2022)



Foto: Fedrickson (2022)

Gambar 10.8 Dokumentasi dengan Kepala Desa Bengkel, Bapak Indra (Memakai Topi)

Tradisi Aru Banjar yakni makan-makan di rumah penduduk suku Banjar dengan menu ayam, tetapi dimasak dengan berbagai jenis masakan khas suku Banjar ini juga dijadikan sebagai sarana untuk menyosialisasikan pentingnya pendataan Regsosek. Hal ini dilakukan supaya masyarakat setempat tidak takut untuk didata oleh para petugas. Selain itu, Bapak Ponimin selaku tokoh masyarakat yang kerap dijadikan panutan di desa Bengkel juga aktif untuk mengajak masyarakat agar bersedia didata oleh para petugas BPS. Beliau yang merupakan pensiunan guru dan telah mengajar sejak tahun 1974 di desa Bengkel membuatnya dikenal oleh banyak masyarakat di desa Bengkel, bahkan Kepala desa dan beberapa kepala dusun di desa Bengkel merupakan mantan muridnya semasa dulu. Oleh karenanya, nasihat dan arahan dari Pak Ponimin kerap sekali menjadi acuan masyarakat untuk bertindak.

“Kalau sehabis salat dari masjid, saya sering nanya apa sudah didata atau belum. Tidak usah takut didata karena saya sudah didata, gitu saya bilang, Mbak.” (Wawancara dengan Pak Ponimin, 2 November 2022)

Beranjak ke desa yang berbeda yakni Desa Kota Galuh di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dengan mayoritas penduduknya merupakan etnis Tionghoa. Pendataan Regsosek ini juga membuat aparat desa harus terjun aktif dalam menyosialisasikan pada masyarakat agar bersedia didata. Hal ini terjadi karena ada penduduk yang tidak bersedia didata karena beranggapan setiap pendataan itu tidak diperlukan karena mereka tidak pernah mendapatkan bantuan. Oleh karena itu, Bapak Martono selaku Kepala Dusun IV Desa Kota Galuh ini kadang harus datang ke rumah penduduk dan membujuk mereka agar bersedia didata. Bapak Martono bahkan ikut juga menjelaskan betapa pentingnya pendataan Regsosek ini demi basis data agar tidak ada lagi tumpang tindih data di pusat maupun daerah.

“Siapa sih yang mau miskin? Itu yang saya tekankan ke penduduk di sini. Kalau bisa ya kita semua kayalah, tapikan pasti ada aja

yang miskin dan layak menerima bantuan, tapi nyatanya datanya tidak ada di pusat. Itu saya jelaskan supaya masyarakat tau kalau data ini nanti dipakai, supaya bantuan itu tepat sasaran karena yang didata bukan cuma yang miskin tapi juga orang kaya.” (Wawancara dengan Pak Martono, 2 November 2022)

Bapak Martono (Gambar 10.9) menyadari bahwa bantuan dari pemerintah yang datang saat pandemi Covid-19 sering sekali tidak tepat sasaran. Beliau mengatakan bahwa data yang ada di pusat sudah tidak dapat dikategorikan layak terutama banyaknya masyarakat yang terimbas Covid-19. Menurutnya, perputaran ekonomi masyarakat di dusunnya sudah banyak berubah, jika yang dulunya miskin saat didata sekitar 4–5 tahun yang lalu, maka belum tentu miskin di masa sekarang begitu juga sebaliknya dengan yang didata kaya pada sekitar 4–5 tahun yang lalu.

“Di dusun saya ini, Mbak, banyak itu orang-orang yang tiba-tiba kaya. Misalnya, anggaplah dia merantau kerja ke luar negeri sana, *awakpun* (sayapun) gak tau dia entah kerja apa-apa di sana. Pulang-pulang dia, dibangun rumahnya, baguslah ekonominya, tapi mungkin dulu dia pas didata, ya miskin. Nah, datanglah ini bantuan dari pusat, dia yang udah kaya sekarang masih dapat bantuan, kan gak cocoklah begitu. Ada juga yang dulu kaya, pas Covid ini dijualnyalah semua barang-barang berharganya, jatuh miskinlah dia, tapi karena dulu didata dia berkecukupan, ya gak dapat dia bantuan itu. Sudah basilah itu data di pusat, gak cocok lagilah sama situasi masyarakat sekarang.” (Wawancara dengan Pak Martono, 2 November 2022)

Dukungan pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan ketua-ketua dari berbagai elemen masyarakat nyatanya sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan Regsosek di Kabupaten Serdang Bedagai. Jaringan yang dibangun oleh BPS Serdang Bedagai dan tercipta atas dasar kepercayaan antara satu sama lain mengikat masyarakat hingga akhirnya bersedia untuk didata oleh para petugas Regsosek ketika datang ke rumah masing-masing. Modal



Foto: Fedrickson (2022)

Gambar 10.9 Dokumentasi Pak Martono (Kaos Hitam)

sosial, yakni jaringan dan kepercayaan inilah yang menjadi fondasi kuat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh BPS terkait pendataan. Pada kenyataannya, BPS memiliki berbagai kegiatan sensus sehingga hubungan dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, ketua-ketua dari berbagai elemen di masyarakat juga harus tetap dipupuk dan dirawat dengan baik demi keberlangsungan pendataan yang benar, valid dan berguna untuk kemajuan bangsa dan negara.

F. *Life Story* Pendata

Menjadi petugas Regsosek memiliki tantangannya sendiri, selain harus menyesuaikan kondisi cuaca yang tidak menentu, situasi dan kondisi lingkungan yang berbeda-beda, mereka juga harus mencoba menyesuaikan diri dengan tingkat emosional penduduk yang tidak dapat ditebak dengan mudah. Penolakan demi penolakan yang harus diatasi dengan baik demi data untuk Indonesia yang lebih baik. Harus berusaha untuk professional di tengah gempuran situasi dan kondisi

yang tak menentu, mencoba memaknai setiap proses pendataan bukan hanya untuk negara namun dapat dijadikan sebagai refleksi dalam menjalani hidup kedepannya.

Habibah adalah salah satu PPL BPS Kab. Serdang Bedagai di Dusun III dan IV, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Beralamat di Dusun I, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Berusia 38 tahun dengan pendidikan terakhir SMA, Habibah merupakan seorang *single parent* yang membesarkan dua orang anaknya yang masih kelas 6 SD dan kelas 1 SD. Dipercayakan menjadi seorang petugas lapangan, setelah melalui seleksi merupakan hal yang sangat disyukuri olehnya. Menurutnya, keterlibatannya menjadi ladang rezekinya untuk menafkahi keluarganya.

“Saya ikut Regsosek ini dikasih tahu teman, Bu. Saya disuruh teman untuk daftar, ikuti tahapan-tahapannya dan alhamdulillah saya lolos, Bu. Senang sekali saya bisa lolos.” (Wawancara dengan Habibah, 5 November 2022)

Sejak bercerai dengan suaminya sekitar empat tahun lalu, Habibah memacu dirinya untuk tetap produktif dan menghasilkan uang demi menghidupi anak-anaknya. Membesarkan anak seorang diri tanpa ada bantuan dari mantan suaminya membuatnya harus memutar otak untuk selalu memiliki pekerjaan agar dapat menyekolahkan anak-anaknya. Kerap sekali ia menangis dan meratapi jalan hidupnya yang cukup berat. Sebelumnya, Habibah sempat menjadi *baby sitter* untuk anak dari adik sepupunya dengan gaji kurang lebih Rp1.000.000,00. Beliau juga sempat bekerja di jalan tol Medan—Tebing Tinggi dan kerap sekali pulang tengah malam, tetapi karena pergantian pimpinan proyek, dia tidak lagi ikut bekerja. Ibu Habibah tidak pernah memilih-milih pekerjaan, menurutnya yang penting adalah menghasilkan uang dan halal.

“Penuh perjuangan membesarkan anak-anak, Bu. Semua saya kerjakan, Bu, untuk bisa menghidupi anak. Jadi buruh pabrik,

kerja di tol, apalagi di tol itu kadang pulang sampai malam ya, Bu. Kadang saya sambil nangis sambil kerja, semua demi anak-anak. Jadi, apapun pekerjaan saya terima aja yang penting bisa untuk menghidupi anak-anak. Demi anak itu aku harus kuat.” (Wawancara dengan Habibah, 5 November 2022)

Menjadi petugas lapangan dalam kegiatan Regsosek memang pertama sekali bagi Ibu Habibah. Sebelumnya, ia memang pernah melakukan kegiatan survei, yaitu melakukan pendataan dari desa terkait jumlah lansia, jumlah wanita hamil. Beliau juga pernah menjadi enumerator dari beberapa lembaga swasta yang melakukan survei politik dan pernah juga menjadi petugas lapangan atau petugas survei KB. Sempat mendapatkan penghargaan dari KB sebagai orangtua hebat, tetapi rumah tangganya tidak dapat bertahan setelahnya dan ia cukup menyayangkan hal tersebut. Ia tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihannya. Beliau berharap rezekinya selalu lancar karena saat ini hanya dia yang dapat menghidupi anak-anaknya. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa walaupun seorang *single parent* dan memiliki dua orang anak yang masih sekolah, keluarganya belum pernah mendapat bantuan sekalipun. Akan tetapi, menurutnya itu tidak masalah karena rumahnya adalah jenis rumah permanen, sehingga mungkin tidak layak jika harus menerima bantuan. Ibu Habibah lebih bahagia jika ia tetap aktif bekerja karena ia masih muda dan tidak ingin dikasihani.

“Saya gak pernah itu dapat bantuan, entah itu PKH atau apalah. Pernah ada yang mendata ke rumah, tapi katanya rumah saya ini bagus, ya gak lah perlu bantuan. Lagian saya juga masih muda, Bu. Mending saya mencari. Yang penting kita sehat, rezeki lancar.” (Wawancara dengan Habibah, 5 November 2022)

Terlibat sebagai petugas Regsosek, Ibu Habibah menyadari pentingnya pendataan ini karena kelak akan berhubungan erat dengan satu data yang sekiranya akan digunakan oleh pemerintah daerah dan pusat dalam pemberian bantuan. Selama ini, kerap sekali bantuan yang diberikan pada masyarakat tidak tepat sasaran dan menimbulkan protes dan ketidakpuasan masyarakat atas kinerja pemerintah. Oleh

karenanya, Ibu Habibah memberikan perhatiannya secara penuh agar ia sebagai ujung tombak dalam pendataan dapat berjalan dengan baik dengan data yang valid.

Melakukan pendataan juga bukan berarti tanpa tantangan. Ibu Habibah yang ditugaskan sebagai PPL di dusun III dan dusun IV, Desa Kota Galuh harus selalu melakukan bermacam pendekatan jika berhadapan dengan masyarakat yang tentunya memiliki tingkat emosi yang berbeda-beda. Selain itu, dusun tersebut juga didominasi oleh etnis Tionghoa dan beliau sering merasakan penolakan berulang dari keluarga yang sama. Perlakuan tidak menyenangkan seperti tidak diizinkan masuk ke dalam rumah dan juga diusir lantaran dianggap tidak penting oleh masyarakat yang hendak didata. Selain tantangan dari masyarakat, ia juga harus menghadapi kondisi lingkungan yang mana hewan seperti anjing berkeliaran. Ibu Habibah harus menghadapi pengalaman dikejar anjing ketika melakukan pendataan.

Itu keluarga yang kemarin itu, Bu. Ddia agak menolak. Sudah berapa kali saya kunjungi itu, Bbu. Katanya lagi gak ada, entah yang kemanalah, nanti sajalah lagi. Pening kali kepalaku, lah. Sudah lima kali saya ke situ, Bu. (Wawancara dengan Habibah, 5 November 2022)

Untuk mengatasi hal-hal yang sulit, Ibu Habibah akan berkoordinasi dengan PML jika sudah mengalami dua kali penolakan. Namun, jika setelah berkoordinasi dengan PML masih tetap ditolak, mereka akan segera menghubungi Koseka agar turut bertindak. Hal ini sesuai dengan arahan yang mereka terima ketika mengikuti pelatihan Regsosek selama dua hari. Melakukan pekerjaan sesuai SOP yang berlaku dan tetap berjuang agar dapat mendapatkan data yang valid dari setiap keluarga di lokasi dimana dirinya ditugaskan oleh BPS Kabupaten Serdang Bedagai. Ibu Habibah menyadari bahwa ia harus selalu melakukan berbagai pendekatan yang berbeda-beda di lokasi dimana ia ditugaskan karena bukan hanya perbedaan etnis yang harus dihadapi, melainkan juga perbedaan kelas sosial yang mana si kaya dan yang mana si miskin.



Gambar 10.10 Ibu Habibah, PPL
Dusun III-IV, desa Kota Galuh
Foto: Ririn, 2022

Berhadapan dengan status sosial ekonomi masyarakat yang berbeda-beda, Ibu Habibah (Gambar 10.10) merefleksikan yang ditemukannya selama di lapangan. Kerap kali ia bertemu dan mendata masyarakat yang sangat miskin dan menguras emosinya. Beliau menyadari betapa pentingnya profesionalitas saat bekerja dan harus tetap melaksanakan pendataan dengan baik dan sesuai kaidah yang berlaku. Tak ayal jika ia sering merasa bersalah karena kerap mengeluh dengan kehidupannya yang juga sebenarnya sangat berat karena harus menjadi *single fighter* untuk menghidupi keluarga kecilnya.

“Bagaimana ya saya jelaskan, Bu. Kadang saya ketemu yang miskin kali, yang rumahnya pun udah enggak layak hunilah, makan pun yang penting ada aja itu pun susah. Kadang saya pikir, kok saya masih ngeluh? Ternyata ada yang lebih susah dari saya, gitu Bu. (Wawancara dengan Habibah, 5 November 2022)

Bergerak dari kenyataan di lapangan, Ibu Habibah kerap menemukan fakta bahwa masih banyak keluarga yang berada di

garis kemiskinan dan sangat miskin yang tidak mendapatkan bantuan sosial. Pendataan yang dilakukan melalui Regsosek ini diharapkan dapat menjadi basis data untuk semua lembaga dan kementerian dalam pemberian bantuan agar tepat sasaran. Oleh karenanya ibu Habibah memberikan perhatian dengan sungguh-sungguh selama pendataan agar data yang ia temukan juga menjadi data yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid.

Beralih ke petugas lainnya yaitu Ibu Sariana yang kerap dipanggil Ibu Ana (46 tahun) adalah tamatan SMK dan merupakan Koseka non organik Kecamatan Perbaungan. Beralamat di komplek Serdang Indah, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Sebagai seorang ibu rumah tangga, beliau juga sempat menjadi kader posyandu, menjadi petugas KPPS, dan KPMD. Beliau juga pernah bekerja di LSM dari tahun 1998—2001. Ibu Sariana memiliki tiga orang anak, yakni 2 laki-laki dan 1 orang perempuan. Kedua anak laki-lakinya kini sudah bekerja, sedangkan anak bungsunya masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Sebelumnya, anak pertamanya pernah diajak bekerja sebagai petugas *entry* data dalam sensus penduduk nasional. Setelahnya, anak pertamanya tersebut mencari pekerjaan yang lebih menetap dan kini bekerja di Sulawesi, begitu juga anaknya yang kedua akhirnya ikut dengan abangnya (anak pertama) dan bekerja di perusahaan yang sama. Walaupun masih tamatan SMK, anak-anak Ibu Sariana bersemangat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, setelah menamatkan pendidikan SMK di Serdang Bedagai, mereka segera merantau dan bekerja agar dapat menabung untuk pendidikannya kelak.

Menjadi Koseka non organik dalam kegiatan Regsosek menjadi hal yang cukup membanggakan baginya karena sebelumnya beliau juga pernah menjadi petugas pencacah dan pengawas lapangan dalam kegiatan-kegiatan BPS. Ibu Ana mengikuti semua tahapan seleksi untuk menjadi petugas Regsosek dan menurutnya semua tahapan yang ia lalui sangat transparan. Walaupun ia pernah menjadi petugas sensus penduduk nasional di tahun 2000, tahun 2010 dan tahun 2020,

mengikuti tahapan seleksi adalah sebuah keharusan walaupun dirinya telah menjadi mitra BPS selama bertahun-tahun.

“Saya itu ikut seleksi, bu. Enggak ada itu istilah anak tiri, anak kandung hanya karena saya udah pernah kerja di BPS, gitu Bu. Mekanisme yang sudah ada harus tetap dilalui, justru kalau enggak ikut daftar *online* itu ya enggak akan jadi kerjanya.” (Wawancara dengan Ibu Ana, 05 November 2022)

Ibu Sariana memahami bahwa tugasnya menjadi seorang Koseka tidaklah rumit, tetapi kerap sekali dia harus turut serta dalam pekerjaan PPL dan PML di lapangan. Membawahi 9 orang PML memiliki tantangan tersendiri baginya. Setiap petugas memiliki pemahaman dan pemaknaan yang berbeda sehingga berpengaruh juga dalam cara para petugas ketika berhadapan dengan masyarakat. Penolakan yang dialami oleh petugas juga menjadi tanggung jawab Ibu Ana sebab ia harus menjamin diterimanya para petugas ketika melakukan pendataan. Berbekal pengalamannya selama bertahun-tahun menjadi mitra BPS, Ibu Ana selalu memberikan nasehat dan jalan keluar kepada para anggotanya agar kegiatan tetap dapat berjalan. Sering sekali Ibu Ana harus turut serta dalam kegiatan pendataan ke rumah penduduk ketika PPL dan PML ditolak berulang kali sehingga Bu Ana harus ikut menjelaskan kepentingan mereka para petugas BPS dan kegunaan data itu kelak.

“Kan setiap orang itu beda-beda pemahamannya, Bu. Kadang yang ini cakupannya bagus, tapi yang ini kurang. Jadi saya sering bilang kalau kerja itu *barengan* aja. Minimal dua oranglah sekali jalan. Misal, dusun A sudah selesai, ya sudah mereka bisa lanjut ke dusun B, biar berkawan saja, gitu Bu. Kan nanti jadi cepat selesainya.” (Wawancara dengan Ibu Ana, 05 November 2022)

BPS yang dalam periode tahun dengan akhiran angka 0, 3, 6 selalu melakukan sensus nasional, Ibu Ana sudah memahami sedikit banyaknya pola yang terjadi di masyarakat ketika dilakukan pendataan. Bantuan sosial adalah salah satu hal yang selalu terbesit di masyarakat

ketika para petugas datang untuk mendata. Menyiasati hal ini, Ibu Ana selalu menekankan kepada anggotanya agar tidak membahas tentang dana bantuan karena persepsi masyarakat nanti dapat beranggapan bahwa pendataan ini sudah pasti menjamin akan diberikannya bantuan pada keluarga. Walaupun kenyataannya bahwa data ini salah satunya digunakan jadi basis data untuk pemberian bantuan, Ibu Ana tidak ingin menebar harapan palsu sebab ia menyadari bahwa tugas mereka hanya mendata, sedangkan bagaimana data itu nanti akan digunakan adalah kembali ke pemangku kepentingan.

Saat melakukan pendataan, Ibu Ana sering kali menekankan kepada para anggotanya untuk profesional dan mengikuti hati nuraninya. Jika dalam pendataan ada keluarga yang mengaku miskin, nyatanya tidak, mereka harus melakukan pendataan apa adanya. Menghadapi masyarakat yang status sosialnya berbeda antara data dari pemerintah desa dan fakta di lapangan. Sebelum turun ke lapangan, mereka melakukan verifikasi yang mana ada dua jenis. Pertama, sudah ada data kesejahteraan berupa *prelist* (jumlah KK kurang dari 400 dalam satu dusun). Kedua adalah data kosong (jumlah KK lebih dari 400 dalam satu dusun). Jika untuk *prelist*, mereka akan langsung menanyakan pada kepala dusun terkait kesejahteraan tiap keluarga, sedangkan untuk data yang kosong, ditanya juga kepada kepala dusun. Akan tetapi, kepala dusun tidak selalu menghafal setiap keluarga dan belum diverifikasi oleh kepala dusun. Ibu Ana dan anggotanya bergerak ke lapangan menggunakan data tersebut. Sesuai SOP, mereka berhak untuk memverifikasi apakah penduduk yang tidak terdata oleh kepala dusun tersebut sangat miskin, miskin, mampu, dan sangat mampu. Data yang diberikan oleh pemerintah desa kerap bertentangan dengan temuan di lapangan. Mengenai hal itu, Ibu Ana dan anggota akan tetap menulis data sesuai temuan di lapangan.

“Yang berat itu kalau kita harus melakukan *geotagging* karena harus berdasarkan pendapat kadus. Jadi miris, Bu. Nanti kalau Ibu lihat nanti rumahnya gedong-gedong, tapi menurut kadus dia susah, tapi ya sudah gak masalah saya pikirkan karena kan nanti

dari foto pemerintah bisa menilai dia layak atau enggak menerima bantuan. Saya sebenarnya bangga, saya senang karena pakai foto, kalau hanya data kan pemerintah gak tau, tapi kalau foto nanti pemerintah bisa tau dia layak atau enggak.” (Wawancara dengan Ibu Ana, 05 November 2022)

Menjadi petugas dalam kegiatan Regsosek ini, Ibu Ana juga menemukan kenyataan bahwa dalam penetapan masyarakat susah dan tidak susah masih berdasarkan nepotisme. Para petugas umumnya akan menukar data yang sebelumnya didapat dari kepala dusun. Jika data yang sebelumnya susah, tapi kenyataannya sangat susah, mereka akan mengubahnya. Namun, berbeda dengan data yang diberikan miskin, kenyataannya mampu, mereka akan tetap menulisnya miskin dengan melakukan *geotagging* apa adanya.

“Kalau kenyataannya dia senang, tapi dibuat kadus dia nomor 2, kami biarkan saja. Enggak peduli kami, Bu, yang penting kami foto, kan foto nanti membuktikan. Namun, misalnya kata kadus dia susah, ternyata di lapangan sangat susah ya kami tukar bu. Kalau didata cuma susah, tapi tanpa difoto ya mana tahu orang kalau mereka susah, kami tukar. Anggap saja misalnya data yang enggak diverifikasi kadus. Karena enggak semua data yang di-*prelist* itu ada, pasti ada aja rumah tangga baru. Jadi, kami yang berhak untuk memberi label tingkat kesejahteraannya.” (Wawancara dengan Ibu Ana, 05 November 2022)

Selama melakukan pendataan, Ibu Ana dan anggotanya sering merasa terbebani saat berhadapan dengan warga yang sangat miskin dan miskin, tetapi tidak mendapat dana bantuan, baik dari pemerintah desa dan pemerintah pusat. Ibu Ana menyadari bahwa jika ia bertindak dengan memberikan informasi ke pusat seperti *command center* yang disediakan oleh Kementerian Sosial RI saat melakukan pendataan Regsosek, beliau mengkhawatirkan akan adanya gesekan antara pemerintah desa dengan para petugas BPS. Sementara, BPS dan para anggotanya kerap sekali melakukan sensus dan survei yang mana harus sering berkoordinasi dengan pemerintah desa.

Bertahun-tahun menjadi mitra BPS, Ibu Ana menyadari bahwa mereka hanya bertugas untuk mencari dan menyediakan data, bukan untuk mengintervensi kinerja pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Beliau berharap, tugas pendata BPS kelak diberikan wewenang untuk melakukan pelaporan jika memang menemukan fakta temuan di lapangan. Masyarakat yang sangat layak untuk segera menerima bantuan agar segera dapat ditindak lanjuti oleh para instansi terkait. Beliau juga berharap data yang mereka temukan di lapangan dapat digunakan dengan bijaksana oleh para pemangku kebijakan demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Indonesia.

G. Life Story Keluarga Fokus Data

1. Kakek Zulkifli dan Nenek Fatmawati

Bau menyengat menusuk tatkala kami berada di depan sebuah rumah yang diarahkan oleh salah satu Koseka BPS, yaitu Ibu Tina. Rumah yang berada di pinggir jalan lintas nasional ini dapat dikategorikan sangat tidak layak huni. Berbagai barang rongsokan ditumpuk di teras rumah, atap bolong, sedangkan di dalam rumah juga kondisinya tergenang banjir (Gambar 10.11). Musim hujan memang menjadi musuh utama bagi mereka yang atap rumahnya setengah langit dan setengah seng berkarat. Terlihat dua orang tua renta duduk di antara tumpukan barang rongsokan sedang diwawancarai oleh seorang petugas PPL. Sesekali si kakek tersenyum dan tertawa sambil mengusap dagunya sementara si nenek terlihat sendu. Setelah selesai, si petugas izin untuk melakukan *tagging* foto ke dalam rumah, si ibu mengarahkannya untuk memakai sepatu bot agar tidak tergelincir dan basah karena kondisinya memang masih tergenang. Si kakek hanya tersenyum ketika kami mulai menyapa dan mengatakan maksud kehadiran kami ke gubuknya yang menjadi tempatnya berteduh dari sengat matahari dan dinginnya hujan. Walaupun, rumah tersebut tidak dapat dikategorikan untuk dapat menahan panas dan dingin.

Kakek tua itu bernama Zulkifli Saleh (69 tahun) dan si nenek bernama Fatmawati (58 tahun) yang telah tinggal di Dusun II, Desa Bengkel sejak tahun 1999. Kakek Zulkifli lahir di Medan dan merupakan keturunan suku Jawa-Aceh, sedangkan nenek Fatmawati lahir di Desa Bengkel dan merupakan keturunan suku Banjar. Mereka memiliki tiga orang anak laki-laki, yang pertama bernama Fauzin (menikah) dan kini tinggal di desa yang sama, tetapi dusun berbeda. Anak kedua bernama Ismail Marzuki (belum menikah) yang tinggal bersama dengan mereka di rumah tersebut dan anak ketiga (bungsu) bernama Alfajar (menikah) tinggal di Tebing Tinggi. Rumah yang mereka tinggali saat ini merupakan rumah bebas sewa dalam artian mereka bebas memberikan harga sewa berapa saja kepada pemilik rumah. Walaupun rumah ini sebenarnya tidak dapat dikategorikan rumah layak huni, mereka masih berusaha memberikan biaya sewa sekitar Rp4.000.000,00 per tahun kepada pemilik rumah. Sebelumnya, pemilik rumah mematok harga sewa rumahnya, tetapi menyadari dengan pasar yang sudah sangat berubah, penghasilan yang semakin tidak menentu, pemilik rumah akhirnya mengizinkan kakek Zulkifli untuk menetap dan mempersilakan mereka untuk tinggal menurut mereka, asalkan diberi tempat saja sudah layak disyukuri.

Di masa mudanya, kakek Zulkifli merupakan perantau. Sempat pergi merantau ke Jakarta, Aceh, dan Palembang, bekerja serabutan, kakek Zulkifli pada akhirnya memilih pulang dan kembali ke Sumatra Utara. Kakek kelahiran Medan yang merupakan keturunan Jawa-Aceh ini sebelumnya bekerja sebagai pedagang bersama dengan istri. Mereka menyediakan bahan pokok di depan rumahnya dan berjualan kerupuk dan dodol ke pasar-pasar di daerah Medan dan Binjai. Menggunakan betor (becak motor), mereka akan berangkat ke Medan di saat subuh untuk mengejar waktu karena jarak dari desa Bengkel menuju Medan berkisar 2 jam sementara jam aktif pasar juga terbatas. Mereka tidak memiliki kios sehingga mereka hanya menjajakan saja kepada para pembeli yang datang ke pasar. Dari pasar satu ke pasar lainnya, begitu hingga sore sebelum kembali ke rumahnya di Desa Bengkel.



Foto: Ririn (2022)

Gambar 10.11 Kondisi Atap Rumah Warga

“Jadi di mana pasar, kami mencoba menjajakan apa yang kami jual. Namun, lama-lama gak tahan juga saya kan karena bawa becak, jauh tiap harilah. Sekitar 50 km ada, yang paling dekat Amplaslah. Dari sanalah nanti ke mana-mana gitu, ke pasar-pasar mana yang ramai, ke Kampung Lalang, ke Binjai, ujung ke ujunglah. Perbatasan kota Medanlah sudah.” (Wawancara dengan Bapak Zulkifli, 2 November 2022)

Namun lama-kelamaan, bapak Zulkifli mulai letih dan merasa tidak sanggup jika tiap hari berangkat ke Medan membawa bentornya dan menjajakan jajanan khas Desa Bengkel. Akhirnya, kakek Zulkifli memilih untuk berhenti berdagang ke daerah Medan dan Binjai. Sempat ditawarkan untuk menetap di Binjai oleh saudara istrinya agar ekonomi mereka dapat lebih baik melihat pangsa pasar di Binjai juga lebih baik daripada Desa Bengkel sejak pembangunan tol dan akibat pandemi, tetapi kakek Zulkifli menolak dan memilih menetap di Desa Bengkel.

“Ada itu kakak bilang, keluarga ibunya, sudah kalau gak, pindah aja ke mari (sini). Mereka itu mau bantu. Buka usaha sajalah di sini kalau sudah agak bagus, sewa rumah di sini. Kalau di

Bengkel sudah enggak memungkinkan, *ngapain* dipertahankan lagi? Jadilah ini kami hidup, dapat sehari makan sehari, mending kalian ke sinilah. Itulah dibilang kakak supaya kami termotivasi untuk pindah ke Binjai.” (Wawancara dengan Bapak Zulkifli, 2 November 2022)

Keadaan pasar yang selalu fluktuatif, keadaan tubuh yang sudah renta, pada masa senjanya, kakek dan nenek ini masih harus tetap menggerakkan tubuh rentanya untuk mencari nafkah demi menghidupi mereka dan anaknya yang saat ini masih tinggal bersama. Sebelumnya, anaknya tersebut memiliki usaha kios pulsa. Namun, karena kondisi pasar yang tak menentu dan ditambah dengan hantaman dari pandemi, kios tersebut akhirnya bangkrut, sedangkan kakek Zulkifli dan istri hanya menjual bensin ketengan untuk bertahan hidup.

Melihat kondisi yang sangat memprihatinkan, kakek Zulkifli dan nenek Fatmawati belum menerima bantuan dari pemerintah daerah. Sebelumnya, mereka sempat mendapat bantuan sosial tunai (BST) dari pusat pada Januari—Agustus 2021, tetapi setelahnya mereka tidak lagi mendapat bantuan, baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat. Survei dan pendataan sering dilakukan ke rumah kakek Zulkifli, tetapi menurutnya pendataan itu sudah dilakukan sejak pemerintahan desa sebelumnya hingga pemerintahan desa yang baru. Pendataan berulang ini ternyata tidak membantu sama sekali karena ketika dana bantuan cair, mereka tidak mendapat. Tentu saja hal ini menjadi sorotan yang sangat kontras melihat kondisi kakek Zulkifli dan nenek Fatmawati sebenarnya sangat miskin dan butuh bantuan. Mereka tidak tahu kegunaan Regsosek karena pendataan berulang, tidak kebagian bantuan membuat mereka menganggap bahwa pendataan ini hanya formalitas saja. Ingin mengadu juga tidak tahu ke siapa dan melalui prosedur seperti apa.

“Pernah itu kadus datang mendata, katanya untuk bantuan, tapi yang lain udah dapat, kami ya enggak dapat. Kami tanya kenapa enggak dapat, katanya nama kami enggak keluar, ya sudahlah,

“mungkin ada yang lebih layak dapat kan?” (Wawancara dengan Bapak Zulkifli, 2 November 2022)

Beranjak ke pemerintah desa setempat, sekretaris desa yang saat itu berada di kantor karena kepala desa sedang kuliah ke Medan menyatakan bahwa pendataan memang dilakukan oleh kepala dusun. Oleh karena itu, mereka tidak tahu bagaimana kondisi spesifik semua masyarakat di Desa Bengkel. Terkait kondisi BLT-DD yang digelontorkan dari dana desa, sebelumnya sudah dilakukan musyawarah desa terkait siapa yang berhak menerima bantuan dana desa.

“Oh begini itu, Bu. Kita memang kalau *ngasih* bantuan itu kita enggak mau ada yang sampai berulang kali dapat. Kalau kondisi bapak itu kan sudah dapat BST. Jadi BLT kami alihkan ke keluarga yang lain. Kalau bapak itu enggak dapat BST lagi harusnya lapor ke kadus. Harusnya kalau data bapak itu udah ada di kami, bapak itu bisa dapat BLT tahun ini.” (Wawancara dengan Sekretaris Desa Bengkel, 3 November 2022)



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2022)

Gambar 10.12 Kondisi Rumah Tergenang Banjir

Kami tidak memiliki kapasitas untuk mengintervensi kinerja pemerintah desa. Selain itu, kami sadar bahwa pendataan Regsosek adalah untuk menyediakan basis data agar dapat digunakan pemerintah. Melihat kondisi keluarga kakek Zulkifli yang memprihatinkan, kami hanya dapat memberitahukan langsung kepada pemerintah desa agar segera melakukan tindak lanjut. Hal ini untuk meminimalisir jika langsung menghubungi *command center* Kementerian Sosial yang dikhawatirkan akan ada gesekan antara pemerintah desa dengan BPS Kabupaten Serdang Bedagai yang memfasilitasi kami ke Ddesa Bengkel. “Baik Bu, terima kasih sudah diinfokan, mungkin ini akan segera ditindak lanjuti oleh desa,” jelas Sekretaris Desa Bengkel.

Setelah dijelaskan perihal maksud pendataan Regsosek, kakek Zulkifli dan istri memiliki harapan besar agar sekiranya mereka yang berada di bawah garis kemiskinan mendapatkan perhatian pemerintah. Mereka yang sudah tua dan renta, badan tidak sekuat dulu sementara mengharap pada keluarga juga tidak selalu ada karena kenyataan bahwa keluarga mereka yang lain juga memiliki kesulitannya sendiri. Kakek Zulkifli dan keluarga berharap bahwa pendataan yang sering berulang ke gubuk mereka (Gambar 10.12) bukan hanya untuk seonggok data yang tidak ditindaklanjuti seperti sebelumnya sebab negara yang baik adalah negara yang menjamin kesejahteraan masyarakatnya.

2. Bapak Johan

Beralih kepada keluarga yang berbeda yang tinggal di Dusun IV, desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Dialah Bapak Johan, seorang keturunan Tionghoa (69 tahun) yang bekerja sebagai pengangkut batu. Beliau tidak tamat SD, tetapi beliau pernah bekerja sebagai jasa servis elektronik ketika merantau ke Jakarta dan Palembang sebelum akhirnya pulang ke Sumatra Utara dan tetap menjalankan usahanya saat ini. Usaha yang dimilikinya tepat berada di sebelah rumahnya begitu juga kendaraan-kendaraan yang beliau gunakan untuk mengangkut batu dan pasir tersusun rapi

di halaman parkir usahanya. Masuk dalam kategori keluarga yang mampu, beliau merasa bahwa dirinya secara pribadi tidak memiliki keluhan terhadap pemerintah karena pada dasarnya, beliau merasa tidak pernah meminta bantuan secara spesifik.

“Saya enggak ada keluhan untuk pemerintah. Buat apa mengeluh, toh saya enggak pernah minta bantuan, kecuali saya minta dibantu, tapi tidak ditolong barulah bisa mengeluh. Saya aja diizinkan bisa pake KUR, kalau enggak dikasih, ya bagaimana cari modal buat usaha ini? (Wawancara dengan Bapak Johan, 2 November 2022)

Terkait dengan pendataan Regsosek, Bapak Johan ternyata adalah salah satu keluarga yang sulit ditaklukkan dalam artian petugasnya datang berulang kali, tetapi beliau tidak bersedia untuk didata. Hal ini tentu saja membuat PPL yang bertugas harus melakukan pendekatan yang berbeda hingga harus berkoordinasi dengan PML dan Koseka. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Habibah (PPL) bahwa dirinya datang hingga lima kali untuk dapat mewawancarai Pak Johan dan hal ini juga kerap ditemuinya di keluarga lainnya di dusun yang sama. Ibu Ana selakuk Koseka, akhirnya meminta tolong kepada Kepala Dusun, Pak Martono, untuk dapat membujuk masyarakatnya agar bersedia didata. Kebetulan Bapak Johan juga merupakan paman dari Kepala Dusun sehingga mampu membuka jalan agar petugas diterima oleh mereka.

Pendataan yang berulang, tetapi tidak jelas terkait tindak lanjutnya menjadi alasan beberapa keluarga tidak bersedia didata. Maraknya kasus penipuan pinjaman *online* juga membuat banyak masyarakat waspada. Takut akan seringnya data tersebar tanpa izin oleh sang pemilik. Sering sekali kepala dusun harus terlibat untuk mendatangi warganya agar bersedia didata oleh para petugas. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kadus, Bapak Martono. Beliau pernah melakukan *update* data sesuai himbuan dari pusat terkait nama-nama yang berhak untuk menerima bantuan. Beliau sebagai kadus tentu mengenal masyarakatnya sehingga beliau melakukan *updating* data

melalui web dan aplikasi yang telah dianjurkan. Namun kenyataannya, walaupun sudah meng-*update* data, data penerima bantuan masih sama dengan data sebelumnya sebelum melakukan *updating* data. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab juga mengapa banyak masyarakat menjadi malas untuk didata bahkan sering beralasan aneh-aneh jika petugas datang ke rumahnya.

Disinggung soal harapannya terhadap basis data, Bapak Johan berharap pendataan ini dapat membantu masyarakat karena selama ini sering sekali orang yang layak menerima bantuan justru tidak menerimanya sama sekali. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bahwa negara ini menjamin perlindungan sosial juga masih rendah terutama setelah dihantam pandemi COVID-19 yang sangat berdampak terhadap pemasukan keluarga. Jika sudah ada basis data, diharapkan selalu ada *updating* yang memudahkan para pemangku kebijakan agar sekiranya setiap kebijakan yang mereka keluarkan tepat sasaran. Terutama terkait seringnya kebocoran data, harapan Bapak Johan juga agar data-data yang sudah diberikan oleh keluarga Indonesia dapat dipergunakan dengan bijaksana dan dijaga sebaik-baiknya.

H. Membawa Kemiskinan dalam Data Solid: Penutup

Pendataan Regsosek di Kabupaten Serdang Bedagai secara umum dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini terjadi selain karena memang nama BPS cukup familiar di tengah-tengah masyarakat, peran pimpinan dalam menebar jaring-jaring sosial kepada pemerintah daerah juga pihak swasta. Kendala yang kerap dihadapi oleh para petugas adalah kondisi cuaca yang tak menentu, banjir, lokasi yang sulit diakses karena jalan yang berlumpur, jaringan internet yang tak memadai di beberapa desa, dikejar-kejar binatang. Selain itu, para petugas juga kerap mendapatkan penolakan oleh masyarakat dan hal ini bukanlah hal baru lagi terutama di daerah kecamatan Pantai Cermin yang mana ada desa didominasi oleh etnis Tionghoa. Serdang

Bedagai selain menjadi salah satu daerah yang memiliki keragaman etnis masyarakat, juga berbatasan dengan berbagai daerah. Hal ini juga kerap menjadi masalah karena membuat petugas mengalami kesulitan jika harus mendata masyarakat yang berbatasan dengan kecamatan dan kabupaten lain.

Dukungan kelembagaan dan kepercayaan yang dibangun oleh BPS sejak dahulu setidaknya mampu memberi jalan keluar ketika petugas di lapangan mengalami kesulitan. Selain itu, rekrutmen yang dilakukan oleh BPS juga menjadi peluang bagi para petugas baik para *fresh graduate* hingga ibu rumah tangga. Menambah penghasilan dan menambah pengalaman menjadi hal yang diharapkan dari kegiatan Regsosek ini. BPS juga menjaga relasinya dengan para mitranya sehingga beberapa petugas yang terlibat dalam kegiatan Regsosek ini merupakan para petugas yang sebelumnya sudah pernah ikut serta dalam kegiatan BPS seperti sensus nasional.

Temuan-temuan di lapangan oleh para petugas memberikan secercah pandangan terkait pendataan dimana mereka berharap jika BPS tidak hanya menjadi penyedia data, jika mereka memang menemukan kondisi yang miris di lapangan, mereka berharap diberikan kesempatan untuk melakukan pelaporan segera. Survei berulang yang dilakukan oleh masing-masing kementerian dan lembaga nyatanya tidak dapat menjamin kesejahteraan masyarakat. Bahkan, kerap kali masyarakat yang sebenarnya sangat layak justru tidak pernah tersentuh oleh bantuan. Hal ini terjadi karena hak-hak mereka sebagai WNI dalam pencatatan sipil juga tidak terpenuhi seperti KK, akta lahir, KTP, dan BPJS, sedangkan dalam pengelolaan bantuan kerap kali pemerintah mewajibkan ketersediaan data tersebut. Namun kembali lagi, hal inilah yang menjadi keunikan selama pendataan Regsosek sebab setiap kementerian dan lembaga memiliki tugas dan fungsinya masing-masing.

Sinergi antara berbagai kementerian dan lembaga terkait perlu ditingkatkan karena dalam kegiatan Regsosek ini, BPS telah menyediakan datanya. Data ini dapat digunakan untuk memetakan kebutuhan masyarakat dan sekiranya para *stakeholder* dapat segera

tanggap dalam menggunakannya untuk Indonesia maju. Seperti harapan Indonesia Emas 2045 tentang kekuatan ekonomi dunia, maka salah satu hal utama yang harus dibenahi adalah sistem perlindungan dan jaminan sosial warga negaranya.

Daftar Pustaka

- Kemenangan, A. N. (2020, 6 Juli). *Reformasi Sistem perlindungan sosial Indonesia*. Kementerian Keuangan, Direktorat Jendral Anggaran. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/reformasi-sistem-perlindungan-sosial-indonesia>
- Putnam, R. D. (1993). The prosperous community: Social capital and public life. *The American of Prospect*, 13, 35.
- Google. (t.t). [Lokasi Desa Bengkel]. Diakses pada 20 November, 2022, dari <https://www.google.com/maps/place/Bengkel,+Perbaungan,+Serdang+Bedagai+Regency>
- Google. (t.t). [Lokasi Kabupaten Serdang Bedagai]. Diakses pada 20 November, 2022, dari <https://www.google.com/maps/place/Serdang+Bedagai+Regency,+North+Sumatra> diakses 20 November 2022